

ABSTRACT

**THE HANDLING PROCESS OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE
2020 MAYORAL ELECTION**

By

Jeni Rahmawati

Administrative violations often occur at the election stage, seeing that the simultaneous elections in Bandar Lampung City in 2020 were held in the midst of the covid-19 pandemic and considering that Bandar Lampung reach the highest administrative violation with a total of 119 violations. The purpose of this study is to evaluate and identify the high number of Administrative Violations in the 2020 Mayoral Election of Bandar Lampung. The research method used is descriptive qualitative with data sourced from interviews, documentation and field observations. The results showed that in the Mayoral Election of Bandar Lampung, administrative violations numbers were high due to two factors, those are violations at the campaign stage and violations of health protocols. In the process of handling Bawaslu's violations, it was found that the mass media's partisanship, the integrity of the supervisory body and the use of 'Money Politics' clause in terms of the gratification on the elections process. Recommendations from this study are the implementation of education in political parties should be carried out massively and periodically, the addition of PKD officers number, strengthening the integrity of organizers, and political education to the community to increase participatory supervision and realize elections with integrity.

Keywords: Bandar Lampung City, 2020 Local Elections, Administrative Violations, and Disputes.

ABSTRAK

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

Oleh

Jeni Rahmawati

Pelanggaran administrasi memang sering terjadi pada tahapan pilkada, melihat pilkada serentak di Kota Bandar Lampung tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 dan mengingat bahwa pelanggaran administrasi tertinggi adalah Kota Bandar Lampung dengan total pelanggaran 119 pelanggaran. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi tingginya angka Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber hasil wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pilkada Kota Bandar Lampung pelanggaran administrasi tinggi dikarenakan dua faktor yaitu Pelanggaran pada tahapan kampanye dan pelanggaran protokol kesehatan. Dalam proses penanganan pelanggaran Bawaslu ditemukan keberpihakan media massa, integritas badan pengawas serta istilah *Money Politik* pada pilkada yaitu sebar vitamin dan salam tempel. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pendidikan didalam parpol dilakukan dengan masif dan berkala, penambahan petugas PKD, Penguatan Integritas Penyelenggara, dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dan mewujudkan pilkada yang berintegritas.

Kata Kunci: Kota Bandar Lampung, Pilkada 2020, Pelanggaran Administrasi dan sengketa.